# Perempuan Miskin Kota di Hadapan Neoliberalisme

**Oleh Heru Suprapto**

Perempuan di hadapan kota metropolitan, seperti Jakarta telah menjadi subjek yang diobjekkan dalam suatu mekanisme pasar sebagai penyokong "kota modern" yang disebut neoliberalisme. Pada mekanisme pasar neoliberal, segala hal disandingkan dalam "etalase toko" atau posisi "menjual" untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mensyaratkan lepas tangan tanggung jawab negara terhadap proteksi dan subsidi rakyatnya untuk diserahkan pads mekanisme pasar yang penuh dengan persaingan dan eksploitasi yang bersinggungan langsung dengan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Perempuan dalam hal ini ditempatkan sebagai komoditas, properti reproduksi sosial, sekaligus sebagai konsumen prospektif karena subordinasi yang menjadi justifikasi dari kultus partiarki.

Perempuan miskin merupakan entitas yang paling merasakan dampak buruk dari agenda-agenda neoliberalisme karena berada di posisi subordinat dalam kultur partiarki, lemah secara ekonomi, clan secara sosial mengalami alienisasi dan deskreditasi sosial berdasarkan kelas ekonomi dan struktur politik di hadapan kelompok masyarakat yang memiliki basis ketahanan ekonomi clan kekuasaan politik relatif kuat.

Krisis ekonomi di Indonesia yang termomentum pads tahun 1960-an, 1997, clan kini pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat perempuan miskin yang paling merasakan beban beratnya mempertahankan dan mengelola ekonomi keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Persoalannya menjadi kompleks ketika perempuan miskin menjalani hidup di perkotaan di tengah krisis ekonomi. Selain tidak bisa mengandalkan alamnya seperti masyarakat pedesaan untuk pemenuhan pangan, jugs labelisasi yang dikenakan pemerintah kepada rakyat miskin kota sebagai entitas yang tidak layak berada di kota neoliberal dapat menimbulkan ekses sosial yang besar. Salah satunya adalah pembatasan

---

Aktif di Jakarta Centre for Street Children (JCSC) dan Aliansi Rakyat Miskin (ARM).

ruang sumber pendapatan untuk meningkatan taraf ekonomi keluarga membuat taraf kesejahteraan keluarga miskin pads level terenclah. Selain itu, perempuan miskin dibebani tugas manajerial keluarga.

**Karakteristik dan Persoalan Multidimensional Perempuan Miskin Kota**

Perempuan miskin kota sebagai unit kelompok dari rakyat miskin kota di Jakarta sebagian besar merupakan kaum urban. Mereka berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Indramayu, Purwokerto, Tegal, Cirebon, Madura, Purwakarta, Ciamis, Sukabumi, Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dll. Selebihnya dari pulau Sumatera, antara lain Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, serta penclucluk asli Betawi yang sebagian keturunan Tiongkok. Mereka datang ke Jakarta untuk memperbaiki taraf perekonomian keluarga karena keterclesakkan ekonomi di daerah kelahirannya. Mereka memilih Jakarta karena imingan dari pihak luar, balk itu dari media massa dengan bermacam programnya, maupun dari pars tetangga atau sanak keluarga yang pulang ke tempat kelahirannya mencitrakan kemegahan dan kemakmuran Jakarta sebagai pusat perputaran uang. Beberapa di antara mereka sudah datang ke Jakarta sejak tahun 1960-an ketika Jakarta mulai gist membangun berbagai infrastruktur, sementara proses pembangunan di daerah-daerah stagnan. Sejak itu, Jakarta menjadi magnet urbanisasi.

Maraknya urbanisasi dari berbagai daerah membentuk pola kampung-kampung yang mereka bangun berdasarkan suku atau lingkaran kerabatnya. Misalnya, Kampung Velbak (sebelum digusur) dan Kampung Depang, Rawasari, Jakarta Timur, terdiri dari orang-orang Indramayu. Kampung Kalijodo, Jakarta Utara, terdiri dari orang-orang Makasar dan sebagian kecil Jawa. Model pembangunan kampung ini sebagai upaya mereka menjaga ruang koeksistensi berdasarkan kolektivitas budaya dari daerah asal dipindahkan ke daerah perantauan. Sehingga, warganya masih teguh bersikap clan berperilaku berdasarkan identitas budaya beserta produk-produknya meskipun sudah tinggal di kota. Pengelompokkan wilayah berdasarkan suku ini membentuk pola kehidupan sosialnya sektarian sehingga kadang meruncing konflik yang ada menjadi konflik massa antar kampung-antar

suku. Belum lagi, dikotomi begitu kuat antara penduduk asli dengan penclatang. Kondisi ini membuat masyarakat tersebut sulit terorganisir sehingga kesadaran politis kurang.

Di tempat lain, telah terjadi pembauran suku-suku disebabkan lahan yang ada semakin terbatas karena pembangunan infrastruktur, seperti mal, perumahan, pusat perkantoran, niaga, dll, yang sering kali menggusur pemukiman yang ada. Kampung-kampung yang warganya beragam suku, antara lain terclapat di Kampung Pedongkelan clan Pengarengan, Jakarta Timur, Kampung Gili Sampeng dan Kampung Pejagalan, Jakarta Barat, Kampung Penjaringan, Jakarta Utara, dll. Pembauran ini membuat sekat-sekat produk budaya seperti tradisi tergantikan dengan identitas budaya barn membentuk sikap dan perilaku mereka lebih liberal dan individualistik.

Perempuan miskin clatang ke Jakarta tidak dengan bekal keterampilan dan pendidikan yang mencukupi. Termasuk modal untuk membuka usaha. Ditambah perspektif bias jender yang berasal dari budayanya. Sehingga, banyak dari perempuan-perempuan miskin ini bekerja hanya mengandalkan tenaga clan tubuh mereka. Sebagian diantara mereka dilacurkan.

Persoalan-persoalan perempuan miskin yang hidup di kota berhadapan dengan persoalan-persoalan perkotaan yang terjahit dari benang-benang ekonomi, politik, sosial, dan budaya menjadi persoalan yang multidimensional. Persoalan multidimensional perempuan miskin kota mengimplikasikan karakteristiknya. Penulis membaginya dalam dua persoalan besar, yaitu:

*1. Persoalan Sosial dan Budaya: Partiarki*

Persoalan besar dalam tatanan sosial clan budaya yang clihadapi perempuan-perempuan miskin adalah pembatasan aktualisasi diri dalam pengambilan keputusan keluarga serta peran dan partisipasi di wilayah publik. Pada kampung-kampung yang didominasi atas satu suku, seperti Kampung Depang yang terdiri dari orang-orang Indramayu dan Kampung Kalijodo yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Makasar, legitimasi budaya (diperkuat oleh legitimasi agama) yang bias jender, yang menyubordinasi perempuan, begitu kental mewarnai pola

kehidupan berkeluarga clan bermasyarakat. Orang-orang Indramayu, terlebih yang kurang berpendiclikan, memandang istri sebagai sosok penting dan central dalam menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak clan keharmonisan keluarga. Peran ini dipelihara oleh mitos-mitos budaya mereka yang sudah dijalankan secara turun-temurun dari para leluhurnya serta di hadapan agama. Sehingga, para suami menyerahkan semua urusan domestik kepada istrinya.

Para istri setiap harinya clikondisikan berkutat mengurusi persoalan domestik clan menjadi tanggung jawab istri ketika salah satu kebutuhan keluarga tidak terpenuhi atau ketika urusan pengasuhan anak tidak berjalan dengan baik. Perilaku anak yang dianggap "nakal", sakit, mendapat nilai jelek di sekolah, atau bolos sekolah merupakan representasi pengasuhan yang salah dari istri. Disini terlihat gambaran keluarga merupakan gambaran baik buruknya pengelolaan rumah tangga yang dilakukan oleh para perempuan ibu rumah tangga, secara tidak langsung jugs menjadi gambaran masyarakat. Kelangsungan reproduksi sosial, termasuk reproduksi nilai, berada di tangan para perempuan secara strategic, namun sialnya masih dikukung kuat oleh sistem clan kultur partiarki yang jelas sangat merugikan para perempuan itu sendiri sampai lintas generasi.

Begitu pun di kampung-kampung yang terdiri dari berbagai macam suku. Meskipun di beberapa kampung yang identitas budaya tempat asal mereka telah tereduksi (deindividuasi) oleh pertemuan berbagai indentitas etnik menjadi identitas sosial, yakni "kaum miskin senasib" sehingga menghasilkan sikap clan perilaku yang lebih liberal clan individualistik, bukan berarti nilai-nilai partiarki disana tidak kental. Beratnya beban mengurus wilayah domestik (mengurus suami, anak, menyediakan segala kebutuhan keluarga), mengelola keuangan keluarga (menjaga ketahanan ekonomi keluarga), clan sekaligus mencari tambahan keuangan merupakan indikator-indikator kuat dari subordinasi perempuan miskin kota di kultur partiarki.

Salah satu catatan penting yang secara tersirat penulis dapat dari kondisi psikologis para perempuan (miskin) baik yang menjadi ibu rumah tangga maupun yang belum menikah adalah sikap clan perilaku penolakan atas kultur yang menindas mereka baik berupa gerak tubuh (minimal mimik muka) maupun verbalisasi. Gejala-gejala psikologis ini diperlihatkan ketika mereka disuruh untuk

melakukan perintah suaminya yang kalau dihitung hampir setiap puluhan menit sekali. Penulis seringkali dibagi berbagai keluhan atas ketertindasan mereka. Mulai dari kekerasan yang dialami di dalam keluarga maupun di depan keluarga lain sampai pads beban kelola ekonomi keluarga. Namun, mereka dihadapkan pads beban social-budaya (partiarki) yang melekat menjadi identitas (stereotipik) keperempuannya. Sehingga, rasa ketidakadilan itu diterimanya pasrah.

Budaya, termasuk agama di dalamnya, mengonstruksi subordinasi perempuan dan mereproduksinya dalam wilayah domestik membuat internalisasi budaya yang semakin dianggap sebagai identitas kodrati, identitas yang dianggap tidak bisa lagi dibantah karena tercipta. Identitas keperempuan inilah yang mau tidak mau diturunkan jugs ke anak-anaknya bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, tidak perlu berorganisasi, karena toh nantinya hanya mengurusi keluarga. Paradigms ini diterapkan pads anak-anak perempuan yang sering dibebani mengurus anggota keluarga yang lain, seperti menyiapkan makanan untuk ayahnya, mengurus adiknya, membersihkan rumah, dan membantu mencari uang untuk tambahan penclapatan keluarga. Banyak para perempuan yang beranjak dewasa, berusia 20-an tahun, diminta untuk menikah. Permintaan ini menunjukkan orientasi domestikasi perempuan. Selain itu, anak-anak perempuan yang bekerja di jalan sering kali mengalami pelecehan seksual, bahkan diantara mereka dilacurkan atau terpaksa melacurkan diri.

Berkaitan dengan organisasi, perempuan miskin merupakan jantung dari pengorganisiran rakyat miskin kota. Setiap pertemuan clan agenda-agenda organisasi selalu dihadiri oleh para perempuan ibu rumah tangga dalam jumlah besar, mendominasi komposisi peserta pertemuan. Di awal pengorganisiran, perempuan miskin sering mematron kulturnya. Mereka harus terlebih dahulu mendapat ijin dari suaminya. Atau seringkali keinginannya mengorganisir diri dengan perempuan lain dibenturkan sendiri dengan identitas "kodrat" keperempuannya: bukan kodratnya perempuan melawan. Selain itu, pengorganisiran perempuan miskin mendapat tantangan besar dari para lelaki, khususnya para suami dengan merasionalisasi bahwa organisasi tidak menghasilkan keuntungan bagi ekonomi keluarga. Para istri ini mendapat labelisasi sebagai istri pembangkang saat

aktualisasi peran dan partisipasinya tampak di arena publik sementara urusan domestik terbelengkalai.

Kentalnya budaya partiarki juga begitu nampak saat pengambilan keputusan organisasi dimana keputusan yang dilemparkan kepada para perempuan diserahkan pads peserta lelaki atau organiser lelaki. Organiser perempuan di awal pengorganisiran sering mendapat ketidakpercayaan kapasitas dalam mengorganisir perempuan miskin kota.

Beberapa deskripsi di atas menunjukkan pembagian peran atau kerja perempuan hanya berada di wilayah domestik. Namun, posisi domestik yang hanya mengurus keluarga dan mengelola keuangan keluarga dari hasil suami bekerja, bergeser atau tugasnya bertambah ke arah ruang publik ketika ditempa krisis ekonomi. Pergeseran atau penambahan tugas ini tidak lebih dari dorongan untuk menyelamatkan manajerial domestik, dimana kebutuhan ekonomi keluarga terancam dan beban pemenuhan kebutuhan di dalam keluarga dibebankan kepada istri, bukan atas kesadaran mengaktualisasikan dirinya di wilayah publik. Namun, nilai produksi masih didominasi laki-laki (bernilai kepala keluarga, penyokong utama ekonomi keluarga) dan aset keluarga masih dikuasai dan akhirnya menjadi milik laki-laki, konsekuensinya laki-laki mendominasi relasi dan struktur sosial, sedangkan perempuan direduksi menjadi properti laki-laki (tenaga kerja tambahan/cadangan) yang dapat menambah jumiah pendapatan keluarga. Sementara itu, pengasuhan anak dan kebutuhan keluarga juga harus terpelihara dengan balk.

Di beberapa tempat, bisa kits Iihat ibu-ibu yang bekerja di jalan ditemani oleh anak-anaknya. Ibu-ibu ini bekerja sambil mengawasi dan mendampingi anak-anaknya. Di antara mereka yang bekerja, para perempuan miskin ini menjadi penyokong utama pendapatan ekonomi keluarga dan ada beberapa suami yang aktivitasnya hanya kumpul dengan teman-temannya sambil mabuk-mabukan.

Meski di beberapa tempat justru perempuan-perempuan miskin ini penyokong utama ekonomi keluarga dan mengeyam pendidikan sekalipun, bukan berarti kemudian ordinasi kelas dalam struktur keluarga dan sosial beranjak naik. Tetap saja, perempuan-perempuan miskin ini disubordinasi ke wilayah domestik.

Pemaparan persoalan sosial dan budaya diatas mengantarkan pads persoalan kedua, yakni persoalan ekonomi clan politik.

*2. Persoalan Ekonomi dan Politik. Kapitalisme dan Neoliberalisme*

Krisis ekonomi belakangan ini, terakhir kenaikan harga BBM di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, membuat perempuan miskin dipaksa keluar dari wilayah domestik (rumah) ke wilayah publik (ruang produksi) lebih dikarenakan beban manajerial ekonomi keluarga. Perempuan miskin harus bekerja keras menyesuaikan kebutuhan keluarga dengan pendapatan yang diterimanya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan suami tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat.

Risiko tidak siapnya penyesuaian dari kondisi krisis ekonomi ini begitu besar. Beberapa keluarga miskin memiliki anggota keluarga yang banyak. Satu pasangan suami-istri bisa memiliki enam sampai sepuluh anak yang rata-rata berusia belia. Kebutuhan makanan bergizi untuk anak-anaknya akan menghabiskan biaya yang besar. Penghasilan rata-rata Rp50.000 per had belum cukup untuk menghidupi keluarga besar. Artinya, krisis ini mengundang risiko kekurangan gizi pads anak-anaknya. Selain itu, ada beberapa keluarga yang sebelumnya menyekolahkan anak-anak mereka. Krisis ekonomi ini membuat anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah. Bahkan, ada yang belum sempat menduduki bangku sekolah.

Kondisi ini membuat perempuan miskin ibu rumah tangga memutar otak agar kebutuhan keluarga terpenuhi clan manajerial domestik tetap mendapat nilai bagus di mats suami, di hadapan kultus partiarki. Seringkali suami tidak mau mengerti urusan domestik yang memerlukan biaya besar. Sejalan dengan itu, penulis menemukan fakta yang sama di beberapa keluarga miskin kota bahwa kebutuhan rokok suami merupakan kebutuhan yang mengeluarkan biaya tertinggi kedua setelah kebutuhan pangan, diluar dari kebutuhan susu anaknya. Selain itu, penulis jugs menemukan fakta di beberapa kampung (penulis keberatan menyebutkan nama kampung) bahwa sebagian keluarga miskin menganggap pelacuran sebagai pilihan yang terpaksa dipilih untuk menyelamatkan ekonomi keluarga karena ketiadaan modal untuk usaha clan begitu terdesaknya kebutuhan keluarga. Istri clan

anak perempuan terpaksa oleh kondisi atau dipaksa oleh suami atau ayah untuk melacurkan diri. Sementara, ada suaminya yang hanya mabuk-mabukan bersama teman-temannya.

Keterdesakkan kebutuhan keluarga memunculkan berbagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Sebagian besar dilakukan gist oleh perempuan. Yang paling cepat adalah dengan mengutang kepada tetangga atau sanak saudara. Upaya ini hanya bertahan sebentar karena beban utang yang semakin menumpuk semakin membebani ekonomi keluarga. Beberapa diantara mereka yang memiliki modal atau berhasil meminjam modal dari sanak keluarga, tetangga, atau renternir membuka usaha dengan mendirikan warung di rumahnya. Selain itu, mereka menjual aset keluarga, berjualan di jalan menjadi pedagang kaki lima, menjadi buruh cuci dan pabrik, menjadi pelayan rumah makan, menjadi kondektur bis, memungut barang-barang bekas (ada yang mulai dari jam sembilan malam hingga jam dua pagi), mengelap kaca mobil di perempuan, mengamen, dan beberapa diantaranya mengemis.

Perjuangan yang berat ini tidak pernah dinilai sebagai kontribusi yang bernilai ekonomis dan politis dalam struktur sosial karena perempuan miskin secara ekonomi dan sosial berada pads kelas dua. Penambahan beban kerja dari wilayah domestik (reproduksi sosial) ditambah wilayah produksi terjadi berdasarkan gagasan-gagasan jender dalam masyarakat dan hubungan-hubungan sosial dalam kerja tersebut. Hubungan ini harus dilihat dalam konteks ekonomi keluarga karena keluarga dipandang mempunyai peran penting dalam produksi. Sehingga, sekalipun perempuan menjadi penyokong ekonomi keluarga tidak memengaruhi ordinasi berdasarkan jender.

Di hadapan kota, di hadapan tatanan sendi-sendi kehidupan yang dijejali produk-produk neoliberal, penyesuaian perempuan miskin menghadapi situasi krisis ekonomi begitu *complicated.* Muncul persoalan-persoalan di kemudian waktu saat berhadapan dengan digdaya neoliberalisme yang mendikte pemerintah kota untuk menyulap kota yang berkosmetik dengan tatanan masyarakatnya yang kapitalistik. Kebijakan ekonomi neoliberal atau pasar bebas yang diadopsi negara menjadikan Jakarta sebagai percontohan "kota modern" bagi kota-kota lainnya.

Kebijakan ekonomi neoliberal selalu memandang kemiskinan (bagian dari persoalan perekonomian) sebagai masalah yang merugikan ketika negara diminta tanggung jawab besar untuk menyelesaikannya. Campur tangan negara untuk menyelesaikan masalah perekonomian ini dengan memberikan subsidi clan proteksi bagi rakyat miskin bertentangan dengan prinsip ekonomi liberal. Subsidi adalah racun bagi rakyat clan membuat rakyat malas bekerja clan berhenti membeli dalam mekanisme pasar. Hal ini yang mendasari berbagai krisis ekonomi dirasa begitu berat dihadapi oleh rakyat terutama yang miskin karena jaminan sosial tidak lagi dijamin oleh negara saat krisis ekonomi dan pangan mengancam. Krisis ini paling menghantam perempuan miskin kota.

Sementara itu, pasar dan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal merancang sedemikian rupa melalui media-media dan kebijakan-kebijakan agar rakyat tetap konsumtif. Muncullah gays hidup urban, hedon, dan konsumtif. Gaya hidup ini jugs memaksa perempuan-perempuan miskin yang belum menikah, khususnya remaja, menggunakannya. Beberapa anak perempuan yang bekerja di jalan yang menjadi dampingan penulis berpenampilan layaknya kaum muds urban, kontras dengan kondisi keluarganya yang miskin. Pendapatan mereka separuhnya untuk membiayai penampilannya itu.

Begitu pun dengan konsep Jaring Pengaman Sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin. Pemerintah mengatakan bahwa BLT merupakan bentuk subsidi atas kenaikan harga BBM, namun sesungguhnya merupakan modal pancingan kepada rakyat miskin untuk menjaga ritme konsumtifnya. Uang Rp300.000 per tiga bulan tidak menjawab persoalan ekonomi keluarga-keluarga miskin yang hanya berpenghasilan antara Rp25.000 – Rp70.000 setiap harinya, bahkan kadang hanya mendapatkan Rp5.000 sehari, sementara inflasi dari kenaikan harga BBM membuat harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan listrik naik. BLT tidak memberikan solusi bagi ketertindasan perempuan miskin berkaitan dengan struktur sosial dan ekonomi. Kapitalisme mengambil keuntungan besar dari partiarki dimana perempuan diposisikan sebagai pengelola keuangan sekaligus konsumen.

Keseharian perempuan miskin disibukkan mengelola wilayah domestik sekaligus menjadi penyokong ekonomi keluarga membuat kesadaran politisnya rendah. Pengorganisiran perempuan miskin kota sulit sekali dilakukan jika langsung memasang target kesadaran politis. Pintu masuk yang paling realistic dapat dicapai adalah menumbuhkan kesadaran ekonomi. Persoalan politik yang sering dialami salah satunya adalah proses pengambilan keputusan atas rencana penggusuran tempat tinggal mereka. Tiadanya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan tersebut membuat posisi tawar mereka rendah sehingga resolusi atas persoalan itu tidak ada selain menguntungkan ketua RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, clan korporasi yang akan menempati lahan setempat. Misalnya yang lain, beberapa kebijakan yang menguntungkan rakyat miskin dan bersinggungan langsung dengan perempuan miskin kota tidak diketahuinya. Tidak heran seringkali terjadi penyelewengan atas pembagian ber[g]s raskin, subsidi minyak tanah, konversi minyak tanah ke gas, dll. Tidak jauh-jauh, persoalan politis di wilayah domestik saja, seperti pengambilan keputusan tidak dimiliki oleh perempuan miskin, namun masih didominasi oleh laki-laki.

Kedua persoalan diatas, partiarki clan kapitalisme, menyubordinasi perempuan miskin kota di hadapan struktur sosial-budaya maupun ekonomi-politik sebagai fakta adanya kelas dalam tatanan masyarakat. Basis persoalan diatas berasal dari institusi keluarga dimana perempuan (istri) merupakan properti dalam kepemilikan pribadi laki-laki (suami) kerena ditempatkan ke dalam wilayah reproduksi sosial (melahirkan dan mengurus anak). Untuk meningkatkan pendapatan keluarga, terlebih karena krisis ekonomi, perempuan miskin yang menjadi properti itu diupayakan menjadi tenaga kerja tambahan untuk menambah pendapatan keluarga. Namun, meskipun perempuan miskin sudah menjadi penyokong ekonomi keluarga dengan bekerja tetap saja di[g] harus mengurusi persoalan domestik dan patuh terhadap suami.

**Basis Ekonomi Perempuan Miskin Kota: Sektor Informal**

Rendahnya pendidikan formal dan pengetahuan perempuan miskin kota menyulitkan mereka bekerja di sektor formal. Kredit yang didapat dari jaringan sosial

tidak cukup menjadi salah satu strategi untuk bertahan dari tekanan hiclup. Sektor informal menjadi ruang produksi yang paling menguntungkan di tengah akses pekerjaan yang begitu sulit. Sektor ini mampu mengatasi krisis ekonomi keluarga yang berclampak langsung ke jantung peran utamanya di wilayah domestik berclasarkan budaya partiarki. Selain itu, ternyata sektor informal (pedagang kaki lima-PKL) merupakan salah satu penunjang perekonomian daerah clan berhasil mengurangi jumlah pengangguran. Menurut data yang dikeluarkan oleh Institute for Ecosoc Rights (2007), perputaran modal PKL sepanjang tahun 2006 mencapai Rp11,75 triliun, lebih besar dari APED DKI Jakarta tahun 2006 sebesar Rp17,97 triliun.

Melihat potensi dan kontribusi sektor informal dalam menunjang perekonomian keluarga dan pemerintahan daerah yang sebagian besar pelaku usahanya perempuan miskin ini, seharusnya perempuan miskin tidak lagi dilihat sebagai tenaga kerja tambahan yang tidak memiliki nilai produksi dan kontribusi sosial bagi perekonomian keluarga dan beban pengembangan kota, tetapi juga memiliki potensi nilai ekonomis dan berkontribusi nyata pads keluarga clan pengembangan kota, balk secara ekonomi maupun sosial sebagai bagian dari bentuk aktualisasi dirinya.

**Terbentur Kebijakan Neoliberal**

Upaya perempuan miskin bekerja di sektor informal tidak semuclah clikerjakan di tengah kota yang membuka keran sebesar-besarnya bagi perdagangan bebas. Berbagai regulasi kota memiliki substansi membatasi ruang gerak kehiclupan dan penghidupan ekonomis melalui cars-cars kreatif clan sektor informal. Regulasi-regulasi ini menguntungkan pars investor dan birokrat pemerintahan, namun merugikan rakyat miskin yang sesungguhnya juga punya hak atas kota.

Reg ulasi-regu Iasi yang dibuat oleh pemerintahan kota clan disahkan oleh DPRD di wilayah DKI Jakarta, antara lain:

1. Perda No.5 tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat clan Usaha serta Pembinaan PKL di DKI Jakarta, yang ditetapkan pads pemerintahan

Tjokropranolo, mengatur hak clan kewajiban para PKL dan pemerintah. Perda ini melarang lokasi-lokasi PKL berdagang clan menetapkan lokasi PKL berdagang. Realisasi perda ini tidak nampak pads Rencana Detail Ruang Kota pads setiap kecamatan. Penetapan lokasi-lokasi berdagang bagi PKL tidak pernah jelas clan pasti. Sementara itu, penggusuran para PKL tetap marak dilakukan. Basis ekonomi perempuan miskin kota begitu terancam.

2. Perda No.4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta atau biasa disebut Operasi Yustisi, yang ditetapkan pads pemerintahan Sutiyoso, memidanakan warga yang tinggal dan bekerja di Jakarta tanpa ada Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta. Kebijakan ini membatasi hak clasar manusia sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan mereka yang dijamin oleh amandemen UUD.
3. Perda No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta, yang ditetapkan pads pemerintahan Sutiyoso, berisi membatasi dan menggusur ruang hidup bersama (koeksistensi) rakyat miskin yang ada di kota, beserta pekerjaan-pekerjaan informal yang sering membutuhkan kreativitas tinggi sebagai perlawanan arus besar perdagancan bebas. Perda ini memidanakan rakyat miskin jika melanggar. Secara tidak langsung, perda ini terkesan mengusir rakyat miskin dari kota.

Berbagai kebijakan diatas memperlihatkan bahwa pertama, rakyat miskin, termasuk perempuan miskin, tidak dilibatkan secara partisipatif dalam pembahasan peraturan daerah, terlebih peraturan tersebut bersinggungan langsung kepada dirinya dan keluarganya; kedua, bahwa telah terjadi deregulasi yang menguntungkan agenda-agenda neoliberalisme samapi tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang diatasnya; clan ketiga bahwa kebijakan-kebijakan di atas menunjukkan tidak transparan clan akuntabeinya pemerintahan kota. Selain itu, anggaran daerah kurang cliperuntukkan bagi program-program pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak berpihak kepada rakyat miskin tetapi kepada pemodal.

Ketidakberpihakan itu ditunjukkan pads data tahun 2000-2005 dimana telah terjadi penggusuran pemukiman miskin besar-besaran yang dilakukan Pemrov DKI

Jakarta beserta petugas-petugasnya yang militeristik. Pada periode tersebut, sedikitnya 78.000 tempat tinggal rakyat miskin clan sedikitnya 65.000 pedagang kaki lima digusur (Institute for Ecosoc Rights, 2007). Jumlah pedagang yang digusur meningkat dari 8.760 pedagang pads 2002 menjadi 11.227 pedagang pads 2006. Hingga menjelang akhir tahun 2008 pola-pola penggusuran paksa masih marak terjadi. Konflik penggusuran ini sudah terjadi sejak tahun 1980-an dimana di mass itu deregulasi tentang penguasaan lahan-lahan di Jakarta cligunakan oleh swasta.

Kebijakan-kebijakan yang tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakatnya, regu lasi-regu lasi yang tidak berpihak kepada rakyat miskin, dan *good governance* yang buruk mengimplikasikan rendahnya kualitas kesehatan (termasuk kelangsungan hidup ibu hamil), rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dikuasai untuk bekerja di sektor formal, rendahnya penghasilan untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan pangan, dan tertutupnya akses kesempatan untuk bekerja pads perempuan miskin sehingga begitu membebani posisi subordinatnya.

**Upaya-upaya Perlawanan Lokal**

Sesungguhnya perlawanan perempuan miskin kota dimulai dari perlawanan terhadap keterbatasan ekonomi untuk pemenuhan keluarga sehingga mereka bekerja meskipun pads akhirnya masih dinilai sebagai tenaga kerja cadangan clan properti laki-laki. Para perempuan miskin ini mengatakan bahwa kalau tidak bekerja mendapatkan tambahan uang, maka anak-anaknya tidak akan sekolah, jumlah gizi clan variasi makanan anak-anak akan berkurang, clan suami akan marak. Berarti di sini wilayah reproduksi sosiainya terganggu.

Fakta di atas menunjukkan bahwa perlawanan lokal perempuan miskin kota dimulai dari kebutuhan ekonomi. Di beberapa kampung, seringkali persoalan ekonomi menjadi pintu masuk bagi proses pengorganisiran. Pembagian BLT pads tahun 2005 yang ricuh clan terjadi banyak penyelewengan menjadi pintu masuk pengorganisiran di beberapa kampung. Selain itu, penggusuran PKL dan pemukiman miskin serta penangkapan rakyat miskin saat bekerja di jalan termasuk pendampingan anak-anak yang bekerja di jalan jugs mengantarkan pars organiser pads pengorganisiran yang berlanjut.

Reaksi spontan yang paling besar clan vokal justru berasal dari para perempuan ketika para organiser memulai pengorganisiran. Reaksi ini mengungkap harapan untuk perubahan mereka selama ini merepresentasikan perlawanan-perlawanan spontan tanpa terorganisir yang sebelumnya dilakukan oleh para perempuan saat terjadi penyelewengan produk-produk subsidi, seperti BLT, minyak tanah, ber$^{g}$s raskin, konversi minyak tanah ke gas, dll, yang seringkali dilakukan oleh pejabat struktur lokal (RT dan RW). Begitu pun, saat terjadi penggusuran tempat tinggal clan properti clagang mereka. Perempuan-perempuan miskin ini dengan spontan menghadang Satpol PP saat clagangannya digusur di Tanah Abang, Senen, Cawang, dll; termasuk penggurusan tempat tinggal seperti di Rawasari, beberapa bulan yang lalu, yang digusur dan dibakar paksa. Spontanitas perlawanan mereka terjadi karena mempertahankan basis produksi, distribusi, clan reproduksi social yang terancam oleh kebijakan-kebijakan neoliberal.

Pada proses pengorganisiran rakyat miskin kota, perempuan merupakan kelompok yang paling aktif berorganisasi dan selalu mendominasi setiap pertemuan-pertemuan yang diaclakan organisasi, termasuk yang muclah climobilisasi untuk aksi protes massa. Proses pengorganisiran ini selalu diawali oleh penyikapan organiser atas sesuatu permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut *(entry point).* Dilanjutkan dengan diskusi-diskusi informal. Yang paling strategic adalah tempat-tempat kumpul ibu-ibu atau di warung-warung yang dijaga oleh ibu. Dimulai dari sans, isu-isu lokal clan sederhana dibahas. Tentang utang dari seorang ibu kepada warung yang sedang jadi tempat kumpul ibu-ibu bisa menjadi bahasan menarik. Atau tentang modal usaha dan harga-harga barang di warung tersebut. Intinya memang yang menjadi bahan "gosip" adalah persoalan domestik. Selebihnya menggosipkan keretakan hubungan Dhani Ahmad dengan Maiya Estianti. Atau kejadian-kejadian di kampung tersebut. Atau jugs gosip tetangga. Hehehe...

Beberapa perempuan-perempuan di kampung memiliki waktu senggang untuk berkumpul bersama, yakni sore hari. Pagi harinya biasanya clihabiskan untuk bekerja. Malam harinya untuk mengurusi wilayah domestik, termasuk melayani suami setelah kerja. Sore hari inilah waktu yang tepat untuk berkumpul sesama tetangga. Ada metode lain yang dapat mengumpulkan mereka, yakni arisan.

*Konferensi Demokrasi dan Trani Modal*

Di ruang clan waktu kumpul ini, dimulai diskusi ringan tentang isu lokal clan domestik. Karena suasananya informal, maka banyak di antara mereka yang antusias menceritakan persoalan-persoalan domestik dan ekonomi clan keluhan-keluhan seputar persoalan-persoalan itu. Selanjutnya, diupayakan bahwa pertemuan informal ini menjadi rutin clan membesar dalam hal kuantitas peserta diskusi. Dalam waktu yang cukup lama, dibentuklah kepanitiaan forum diskusi ini clan mekanismenya. Ini adalah awal dari terbentuknya organisasi lokal yang dimotori oleh perempuan. Ini adalah salah satu pendekatan mengorganisir perempuan miskin.

Dilanjutkan pads diskusi-diskusi yang melibatkan banyak orang, termasuk laki-laki, clan tematik. Putar film. Pembentukkan struktur organisasi lokal. Rapat organisasi. Rapat akbar. Dan banyak kegiatan lainnya. Peserta di setiap pertemuan ini didominasi oleh perempuan, maka pelibatan perempuan dalam pengambil keputusan dan struktur kepanitiaan clan organisasi harus menjadi pertimbangan besar.

Di wilayah domestik, upaya melakukan pendidikan berbasis fender kepada anak-anaknya bisa dilakukan oleh ibu-ibu sebagai bagian dari reproduksi sosial dan nilai untuk membalikkan tatanan partiarki kelak. Seminal, urusan domestik tidak hanya urusan anak perempuan tetapi jugs anak laki-laki. Posisi strategic reproduksi sosial ini penting untuk didampingi karena ini bentuk perlawanan paling dekat, yakni di wilayah domestik.

Namun, dalam prosesnya tidak mudah. Pelibatan perempuan dalam organisasi clan aktivitas-aktivitas organisasi menclapat tantangan besar dari keluarga, khususnya suami mereka. Pelarangan suami terhadap para istrinya dalam berorganisasi sering ditemui. Begitu pun labelisasi: pembangkangan dari para istri terhadap suaminya (legitimasi budaya clan agama) clan terbelengkalainya urusan domestik menjadi alasan para suami melarang aktivitas istri berorganisasi.

Larangan-larangan itu semakin larut ketika persoalan-persoalan mendesak, seperti akses pendidikan clan kesehatan dipersulit, pemukiman mereka terancam digusur, atau subsidi yang tidak tepat sasaran terbentang di hadapan mereka. Para laki-laki pun akhirnya menclukung. Pada kasus-kasus seperti itu, perspektif politik sudah mulai diintervensi ke dalam perjuangan atas kebutuhan ekonomi.

*Panel Perlawanan Lokal Perempuan*

Partisipasi clan kontribusi mereka ke dalam aksi-aksi massa menentang kebijakan-kebijakan yang mendeskreditkan rakyat miskin begitu besar. Aksi massa menentang operasi yustisi serta penggusuran dan penangkapan rakyat miskin sering dilakukan. Termasuk aksi-aksi lokal di kelurahan atau di kecamatan. Atau minimal mendatangi rumah Ketua RT/RW beramai-ramai.

Tantangan terbesar dari perlawanan politis adalah resistensi dari struktur kekuasaan clan kelompok-kelompok sektarian yang memang disewa untuk mengintimidasi clan mereduksi gerakan ini. Semisal, Forum Betawi Rempug menjadi alat pemukul langsung gerakan ini ketika basis mereka bertetangga dengan basis perempuan ini. Banyak suami-suami mereka diintimiclasi psikis maupun fisik agar istrinya (karena mereka yang lebih aktif tidak ikut berorganisasi clan melawan. Atau pads kasus penggusuran, preman-preman yang disewa oleh pihak yang diuntungkan dari penggusuran ini mendatangi langsung kampung yang akan digusur untuk memprovokasi dan mengintimidasi warga agar pergi dari wilayah tersebut. Begitu pun pihak kepolisian dan Ketua RT/RW menjadi alat mereduksi gerakan.

Persoalannya memang gerakan massa ini selalu terkendala pads disiplin, soliditas, clan militansi gerakan. Ini yang menjadi persoalan gerakan rakyat miskin kota. Selain, strategi clan taktik yang tepat. Banyak di antara partisipan gerakan terbuai oleh sogokan dari pihak yang dilawan. Sulit jika kesadaran mereka masih berangkat dari kesadaran ekonomi. Selain itu, persoalan besar lainnya yang dihadapi perempuan miskin kota bersama elemen miskin kota lainnya adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang mendukung agenda-agenda neoliberalisme. Contohnya saja, penggusuran paksa disertai dengan pembakaran di Kampung Velbak dan Kampung Rotan Rawasari. Ribuan Satpol PP yang bringas dikerahkan bersama traktor-traktor untuk menggusur paksa. Bahkan, salah satu organiser ditodong pistol oleh pimpinan Satpol PP saat negoisasi berlangsung.

Sesungguhnya pengorganisiran rakyat miskin kota tidak ada tanpa pengorganisiran perempuan-perempuannya karena mereka yang paling dirugikan atas kondisi ekonomi sosialnya sehingga mendorong mereka aktif berorganisasi. Beberapa organiser melupakan ini. Perempuan-perempuan miskin hanya climobilisasi karena jumlahnya banyak clan mudah dikumpulkan, tetapi tidak

**dipandang bahwa persoalan neoliberalisme begitu mengenai jantung pertahanan rakyat miskin yang letaknya ada di institusi keluarga. Para perempuan inilah yang memegang kendali itu. Oleh karena itu, penghapusan Was berdasarkan ekonomi kapitalistik harus sejalan dengan penghapusan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang ada di masyarakat. Konsekuensinya, perempuan harus dilibatkan dalam proses produksi dan hubungan sosial dari ranch publik sampai domestik untuk memecahkan setiap permasalahan masyarakat secara bersama-sama. Upaya ini merupakan bantahan telak sekaligus dekonstruksi dari "kepemilikan produksi dan hubungan sosial" yang dikultuskan oleh kapitalisme dan partiarki.**